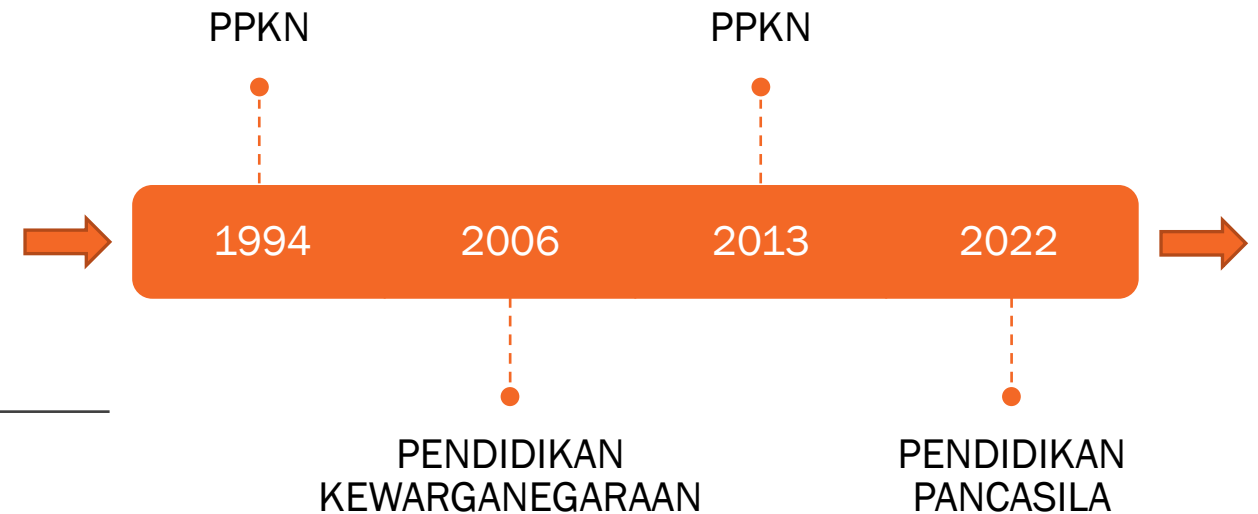


Pendidikan Pancasila ataukah Pendidikan Kewarganegaraan



WINARNO NARMOATMOJO

FKIP UNS

Disajikan dalam Diskusi Terumpun oleh
P2G dan AGPPKnI, 6 Maret 2022

Konteks

Mata Pelajaran PPKn (kurikulum 2013) akan berganti nama menjadi Mapel Pendidikan Pancasila (kurikulum Merdeka) , berlaku sebagai pilihan bagi sekolah yang akan menggunakan Kurikulum Merdeka mulai Juli 2022

Dilatari oleh keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 yang diperbarui lagi dengan PP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan tertanggal 12 Januari 2022. PP ini menyebut eksplisit adanya Mapel Pendidikan Pancasila di jenjang pendidikan dasar dan menengah

Keluar pula Permendikbud ristik No 7 Tahun 2022 tentang standar isi tertanggal 10 Feb 2022. Dalam Permen tersebut tersurat isi muatan dari Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan dari jenjang SD sampai SMA. Muatan pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan dimuat dalam mapel dengan nama Pendidikan Pancasila

Simpulan: species dari pendidikan kewarganegaraan di Indonesia (sbg genus) mengalami perubahan, terulang kembali sebagaimana sejarah perkembangan pkn itu sendiri di Indonesia

Apa yang salah?

Teks pertama

Komunitas bidang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia pada umumnya sudah paham bahwa bidang kajian ini adalah paling rentan terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi.

Sejak dari nama Civic, Pendidikan Kewargaan Negara , Pendidikan Kewarganegaraan, PMP, PPKn, Kewarganegaraan, Kewarganegaraan dan Sejarah, PKn, PPKn sampai nama Pendidikan Pancasila. Sebenarnya tidak sekedar nomenklatur tetapi juga perubahan muatan pendidikan didalamnya. Mengapa bisa

Bidang ini boleh dikatakan sebagai disiplin ilmu yang unik, sebab perkembangannya lebih banyak dilatari oleh aspek aksiologi bukan ontology/epistemology seperti disiplin ilmu pada umumnya. Ia lebih merupakan amanat dari komunitas politik yang senantiasa berubah dan berkembang dalam rangka menentukan karakter warga negara yang baik menurut nya. Misi pkn mengikuti misi dari komunitas politik yang ada.

Di sisi lain, bidang kajian ini lebih merupakan disiplin ilmu (baru) yang masih berkembang untuk menunjukkan kematangannya sebagai disiplin ilmu yang bersifat multidisipliner dan atau transdisipliner khususnya sebagai pendidikan disiplin ilmu social. Sampai saat ini sistem pengetahuan (body of knowledge) pkn belum mampu terpetakan dengan baik. Sesungguhnya apa yang menjadi muatan pkn itu?

Teks kedua

Pendidikan kewarganegaraan sekolah akan hadir dengan nama Mapel Pendidikan Pancasila .

Dapat kita katakan , ini lahir dari jalur pemikiran politik, (dari PP No 4 tahun 2022). Bagaimana dengan jalur pemikiran lain yakni akademik? Jalur pemikiran politik lebih bersifat *decisif _untuk dllaksanakan*. Jalur akademik sebenarnya lebih ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan , namun bersifat *debatable_tidak berkesudahan*.

Antara pemikiran jalur politik dan akademik, sesungguhnya bisa didekatkan guna saling mendukung. Pemikiran jalur politik akan kuat pertanggungjawabannya apabila didukung oleh pemikiran akademik. Sebaliknya pemikiran akademik tidak akan berkesudahan jika tidak diwujudkan menjadi pemikiran politik.

Pemikiran politik yang tidak didukung jalur akademik bisa menimbulkan bias konsep, kesalahan konsep dan bahkan tidak bisa dijelaskan secara ilmiah.

Lahirnya istilah Pendidikan Pancasila sebagai species dari pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sebagai bentuk pemikiran politik perlu didukung oleh pemikiran akademik agar kuat pertanggungjawaban ilmiahnya.

Bisakah?

Teks ketiga

Dalam dokumen standar isi (Permen No 7 tahun 2020) tersirat bahwa isi mapel Pendidikan Pancasila terdiri atas dua: isi muatan Pendidikan Pancasila dan isi muatan Pendidikan Kewarganegaraan Isi muatan kedua kajian tersebut tiap jenjang berbeda.

Bagi yang berparadigma pragmatis bisa diterima , sebab meskipun namanya Pendidikan Pancasila ia tetap berisikan muatan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila yang sekarang dijadikan pesan penting oleh komonitas politik saat ini. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan dalam rangka mewarganegara-kan orang Indonesia , sedang pendidikan Pancasila dalam rangka penanaman nilai nilai Pancasila bagi warga Indonesia

Pendidikan kewarganegaraan sebagai *separated subject* tidak hilang dari kurikulum Indonesia, meskipun dengan nama lain.

Namun bisa juga tetap dipertanyakan bisakah yang namanya Pendidikan Pancasila itu memuat pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan nilai Pancasila? Apakah Pendidikan Pancasila itu sebuah disiplin ilmu yang memang layak memuat kajian tentang kewarganegaraan ? Atau apakah kewarganegaraan merupakan bagian/salah satu muatan dari Pendidikan Pancasila ? Apa dasar pemikiran akademiknya?

Teks keempat

Sependek pengetahuan penulis, Pancasila bisa dan telah dicoba menjadi disiplin ilmu , ketika dimunculkan menjadi Filsafat Pancasila (upaya akademik dari Prof Notonagoro dan para ahli lain). Filsafat Pancasila berisi kajian mendalam _secara filosofis , isi muatan masing masing sila Pancasila maupun hakekat dari Pancasila dalam kontek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia

Namun sampai saat ini belum terdengar atau dikatakan Pendidikan Pancasila sebagai pendidikan disiplin ilmu_ sebagaimana umumnya pendidikan disiplin ilmu yang diberikan untuk kepentingan pendidikan.

Untuk menjadi disiplin ilmu atau pendidikan disiplin ilmu perlu dikembangkan agar memenuhi unsur dalam pendidikan disiplin ilmu , seperti memiliki obyek kajian/ontology, metode pengembangan/epistemology, tujuan/manfaat/ aksiologi, etika ilmiah, dan komunitas ilmiah.

Pendidikan Pancasila tidak bisa semata mata mencakup , mengklaim atau mengambil alih kajian atau muatan yang sudah ada di disiplin ilmu atau pendidikan disiplin ilmu yang lain. Contohnya mencakup kajian tentang kewarganegaraan

Ia harus mampu menemukan dan menentukan bahan kajian yang terbedakan dengan disiplin ilmu lainnya.

Simpulan

Jadinya, munculnya Pendidikan Pancasila itu politik atau akademik?

Ia muncul dari jalur pemikiran politik, sesuatu yang sudah benar dalam konteks negara hukum Indonesia. Namun ia memerlukan penjelasan dari jalur pemikiran akademik agar kuat pertanggungjawaban ilmiahnya

Dilihat dari isi muatannya, Pendidikan Pancasila memuat kajian tentang kewarganegaraan dan substansi kajian Pancasila. Padahal selama ini, dengan mengikuti jalur pemikiran akademik yang berkembang, kajian dan muatan kewarganegaraan merupakan isi dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri.

Pendidikan kewarganegaraan di banyak negara memuat kajian tentang pengetahuan, karakter dan keterampilan kewarganegaraan guna menyiapkan warga negara menjadi cerdas, bertanggung jawab dan terampil dalam kehidupan bernegara sejalan dengan komunitas politik nya

Jadinya sulit untuk mencarikan pertanggungjawaban akademik ilmiahnya , bagaimana bisa (pendidikan disipilin ilmu) Pendidikan Pancasila meliputi kajian perihal kewarganegaraan. Sebaliknya mengikuti pendekatan historis dan komparatif yang ada, kajian mengenai ideologi/nilai.karakter bangsa itu merupakan bagian dari isi pendidikan kewarganegaraan

Rekomendasi

Apabila tetap akan dijalankan, maka perlu dikonstruksi bhw: **Mapel Pendidikan Pancasila** merupakan bentuk dari pendidikan kewarganegaraan di Indonesia pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang

1. mengemban misi sebagai pendidikan nilai Pancasila, pendidikan kesadaran hukum , pendidikan kebangsaan dan pendidikan multiktural bagi peserta didik agar menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, berkarakter dan partisipatif
2. berisikan kajian (ruang lingkup) utama mengenai Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi nasional dan pandangan hidup bangsa; UUD 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara (empat konsensus dasar kebangsaan)

Perlunya Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan seluruh obyek kajian (ruang lingkup utama) pendidikan kewarganegaraan . Jadikan Pancasila sebagai subyektivus genetivus

Perlunya penataan lanjut mengenai ruang lingkup materi Pendidikan Pancasila agar dalam hal isi pengetahuan tersusun secara akademik ilmiah, tidak terjadi overlapping, bias konsep & ketidakjelasan konsep

Dalam hal proses baik pengetahuan, sikap dan keterampilan kewarganegaraan perlu dilakukan penataan dan urutan yang psikologis pedagogis

Matur nuhun

